



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI ISMAWATI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 79321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	13.075.000.000
1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 775 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 10.000.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
5. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 1.200.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	163.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.530.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	108.646.335



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

13.386.176.335

III. HUTANG

Rp.

198.681.290

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

13.187.495.045

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.